



PENGARUH PAD, PMDN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP PDRB DAN TINGKAT KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Aloisius¹ dan Meiran Panggabean²

¹ Magister Ilmu Ekonomi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Indonesia

² Magister Ilmu Ekonomi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Indonesia

*E-mail korespondensi: meiran.panggabean@ekonomi.untan.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Anggaran Pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kemiskinan, baik secara partial maupun secara simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel gabungan dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 yang ber sumber dari Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah. Data ini dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, anggaran pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. PAD dan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata kunci: PAD, PMDN, anggaran pendidikan, PDRB, tingkat kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Regional Original Income (ROI), Domestic Investment (DI) and Education Budget on Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Poverty, both partially and simultaneously. The data used is secondary data in the form of combined panel data from 12 regencies/cities in West Kalimantan Province in 2015-2020 which originate from the Central Bureau of Statistics and Regional Education Balance. This data is analyzed using path analysis (path analysis). The results showed that ROI had a positive and significant effect on GRDP, DI had a positive and significant effect on GRDP, the education budget had a positive but not significant effect on GRDP. ROI and DI have a negative and insignificant effect on the poverty rate, while the education budget has a negative and significant effect on the poverty rate in districts/cities in West Kalimantan Province.

Keywords: ROI, DI, education budget, GRDP, poverty level



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi standar hidup tertentu. Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai rendahnya sumber daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa sandang, pangan, papan dan aspek-aspek lainnya. Seseorang yang tidak mampu melewati garis kemiskinan yang ditetapkan termasuk dalam kemiskinan absolut sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.

Hingga tahun 2021, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat pada tercatat sebesar 7,15%. Pada tingkat Kabupaten/Kota, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi, yakni sebesar 12,01% dan yang terendah berada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 4,34%. Di antara 14 Kabupaten/Kota, ada 7 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya melebihi propinsi.

PDRB sebagai nilai tambah dari 17 lapangan usaha yang bertambah setiap tahunnya, yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi, belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ketapang, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2020, ternyata ditandai dengan tingkat kemiskinan tinggi, yakni 10,13%. Kabupaten Mempawah yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat (3,10%), terbebani dengan tingkat kemiskinan 5,18% (lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya).

Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang diminati oleh para investor. Kehadiran investor diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan untuk meningkatkan PDRB (pertumbuhan ekonomi) sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Investor yang bertambah diikuti dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus mengalami kenaikan. Sampai dengan tahun 2020 tercatat realisasi investasi proyek Penanaman Modal Dalam Negeri tertinggi pada Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 5.265,392 Milyar rupiah, disusul Kabupaten Ketapang (Rp.1.481,467 Miliar), Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Landak (Rp.961,191 Miliar). Penanaman Modal Dalam Negeri yang terendah di Kabupaten Melawi hanya sebesar Rp. 33,619 Milyar rupiah.

Kreasi pemerintah daerah untuk memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah membuahkan hasil yang positif. PAD cenderung meningkat setiap tahunnya, dari Rp.130,164 Milyar tahun 2017 menjadi Rp.150,065 Miliar tahun 2020. Data pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan rata-rata penerimaan PAD tahun



2015-2020 terus mengalami kenaikan. Peningkatan PAD ini bersama dengan PMDN berdampak positif terhadap PDRB dan penurunan kemiskinan.

Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan di suatu daerah. Kemiskinan dan tingkat pendidikan berbanding terbalik, semakin rendah tingkat kemiskinan maka cenderung tingkat pendidikannya semakin tinggi. Investasi di bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki pendidikan berkualitas akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula sehingga diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam rangka menjalankan program “pendidikan untuk semua” (*education for all*), anggaran pendidikan yang dialokasikan ke Propinsi Kalimantan Barat meningkat setiap tahunnya dari Rp. 416,68 Trilyun tahun 2016 menjadi Rp.492,5 Trilyun tahun 2019 atau 20 persen dari total APBN.

Peningkatan PMDN, PAD dan Anggaran Pendidikan di masing-masing Kabupaten/Kota tidak selalu diikuti dengan peningkatan PDRB dan penurunan tingkat kemiskinan. Ada variasi pengaruh yang ditimbulkan. Ada Kabupaten/Kota yang Nilai PMDN, PAD, dan Anggaran Pendidikan yang lebih tinggi, ternyata PDRBnya lebih rendah, dan tingkat kemiskinannya lebih rendah. Keadaan yang tidak konstan ini menarik untuk diteliti.

KAJIAN LITERATUR

Harrod-Domar dalam Supratyoningih & Yuliarini (2022) mengatakan bahwa pembentukan modal (investasi) diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Investasi yang tinggi mendorong perekonomian akan kuat (*steady growth*).

Mardiasmo (2002) dalam Rarung (2016) menjelaskan bahwa selama ini PAD memiliki peran penting untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dengan memajukan perekonomian daerah. PAD mempengaruhi besar kecilnya belanja pemerintah sehingga ketika pemerintah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah juga harus memiliki PAD yang besar.

Hasil penelitian Suryatno Wiganepdo S (2022) menunjukkan bahwa saat terjadi kenaikan penanaman modal dalam negeri di tiga puluh provinsi di Indonesia, maka angka kemiskinan di Indonesia akan menurun. Hasil yang sama juga terjadi bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Walaupun secara umum PMDN maupun PMA berpengaruh signifikan dalam membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, namun berdasarkan hasil analisis ada satu sampai dua provinsi dimana PMDN ataupun PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi tersebut seperti yang dilaporkan melalui penelitian yang



dilakukan pada Kabupaten Siak dengan mengambil data tahun 2003-2012 oleh Wardani (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap PDRB. Artinya adalah semakin naik PMDN maka PDRB semakin menurun.

Hasil penelitian I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa & Yasa (2019) menemukan bahwa tingkat pendidikan dan investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Variabel tingkat pendidikan, investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Menurut Asih Handayani (2018) variabel pendidikan terwakili dengan banyaknya siswa yang menamatkan jenjang menengah atas atau SLTA menunjukkan bahwa angka kemiskinan.

Menurut Todaro & Smith, (2008) dalam Romhadhoni, *et al* (2019) bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. Penelitian sebelumnya oleh Wiguna (2013) di Jawa Tengah menggunakan data sekunder tahun 2005-2010 dan dianalisis dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder tentang PMDN, PAD, Anggaran Pendidikan, PDRB dan tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020. Sumber data merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Selanjutnya pengolahan data dengan menggunakan program EViews Version 12.

Analisis jalur dikembangkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Menurut Riduwan (2021) analisis jalur ini untuk menganalisis pola hubungan antar variable. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variable eksogen (bebas) sebagai variabel penyebab, terhadap seperangkat variabel endogen (terikat) yang merupakan variabel akibat.

HASIL & PEMBAHASAN

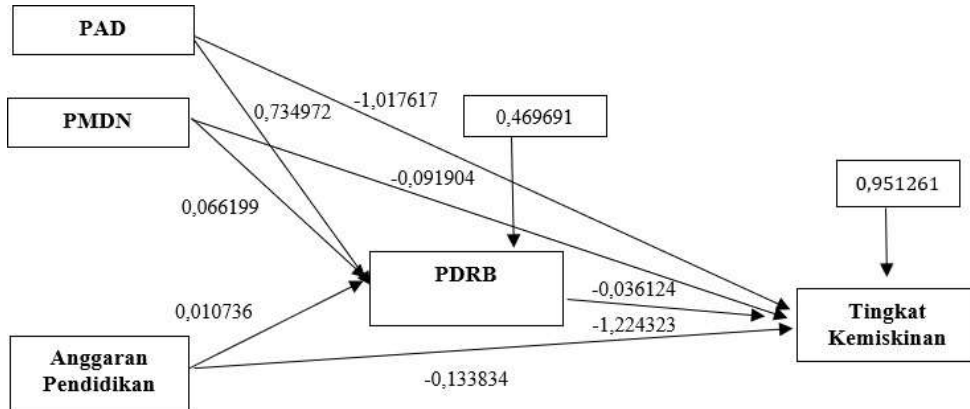
Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh PAD, PMDN, anggaran pendidikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, (2) pengaruh PAD, PMDN, anggaran pendidikan dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan pada



Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, (3) pengaruh PAD, PMDN dan anggaran pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil analisis regresi maka diperoleh diagram analisis jalur sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Analisis Jalur



Sumber: Hasil Analisis Data (2023)

Pengaruh PAD terhadap PDRB

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan pendapat Rarung (2016) yang melakukan penelitian di Kota Manado selama periode tahun 2005-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PAD secara parsial mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan PDRB ADHK 2000. Secara bersama-sama PAD dan DAU memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan PDRB ADHK 2000. PAD juga menjadi sumber dana untuk pengeluaran/belanja pemerintah daerah seperti yang disampaikan Mankiw (2007) dalam Utami & Indrajaya (2017) yang menyatakan kenaikan pengeluaran/belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Kemampuan pengeluaran/belanja Pemerintah yang tinggi akan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Tingginya kegiatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada meningkatnya PDRB Kabupaten/Kota.

Pengaruh PMDN terhadap PDRB

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB. Hasil ini sesuai dengan penelitian Trisnu & Purbadharmaja (2012) bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing



secara simultan berpengaruh signifikan dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. PMDN yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menambahkan pentingnya pembentukan modal, peran investasi dan tetap memperhatikan pengeluaran masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tetap berperan dalam kebijakan fiskal yang menumbuhkan iklim investasi dan kepercayaan kepada para investor. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan direspon positif akan menarik investasi dan pembentukan modal di daerah. Kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modal juga karena adanya relasi antara pemerintah dan pengusaha yang harmonis, infrastruktur jaringan telekomunikasi yang baik, transportasi antar daerah sampai ke daerah terpencil dan kurangnya bencana alam. Masalah fisik yang selama ini dikeluhkan yaitu yaitu buruknya transportasi, ketika masalah tersebut telah dilakukan perbaikan akan memberikan dampak pada semakin rendahnya biaya ekonomi yang ditimbulkan.

Pengaruh anggaran pendidikan terhadap PDRB

Hasil analisis data menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eka, et al (2016) yang berkesimpulan bahwa pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB dan secara simultan dengan anggaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Nalyda Yola Althofia (2015) pengeluaran pemerintah sector pendidikan terhadap pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan koefisien yang distandarisasi. Todaro dan Smith (2012) dalam Merlin Anggraeni (2015) juga menyarankan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi tidak langsung dalam meningkatkan modal manusia. Ada pendapat dari beberapa ahli ekonomi sebelumnya yang menempatkan manusia sebagai modal yang penting dalam factor produksi. Semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktifitas sehingga PDRB meningkat.

Pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan

Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung PAD yang tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negative terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini tidak sejalan



dengan hasil penelitian Riry Isramiwarti, M. Rasuli (2019) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap turunnya tingkat kemiskinan. Ada beberapa hambatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan terutama pengaruh geografi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah dan jarak yang tinggi serta terbatasnya PAD menyebabkan Kabupaten/kota tidak bisa mengakomodir upaya-upaya pengentasan kemiskinan sampai ke semua daerah terpencil.

Pengaruh PMDN terhadap tingkat kemiskinan

Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung PMDN yang tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian Suryatno Wiganepdo S (2022) yang menyatakan saat terjadi kenaikan penanaman modal dalam negeri di tiga puluh Provinsi di Indonesia, maka angka kemiskinan di Indonesia akan menurun. Namun, disampaikan pula bahwa berdasarkan hasil analisis ada satu sampai dua Provinsi dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi tersebut.

Pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat kemiskinan

Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan serta memiliki hubungan negative. Hal ini sejalan dengan pendapat Harianja et al., (2020), Asih Handayani (2018), Nopriansyah, et al (2015) dan Putra & Arka (2016) yang berkesimpulan bahwa pendidikan memiliki efek berseberangan dengan kemiskinan, setiap terjadi kenaikan pendidikan, akan menurunkan jumlah angka kemiskinan. Rata-rata anggaran pendidikan terpenuhi 20% pada tahun 2020 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran yang pendidikan yang memadai dan berkesinambungan tentunya sangat diperlukan mengingat persoalan yang dihadapi adalah jumlah dan sebaran penduduk, luas wilayah, jarak antar daerah dan minimnya infrastruktur pendidikan.

Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh tidak signifikan serta memiliki hubungan negative terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dama, et al (2016) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. PDRB yang tidak terdistribusi merata akan berdampak pada tidak terciptanya pembangunan di segala sektor lapangan pekerjaan dan akan membuat semakin tingginya tingkat kemiskinan. Keadaan



geografi Kabupaten/Kota dimana jarak antar daerahnya berjauhan sehingga sebaran penduduk cukup tinggi menjadi salah satu hambatan. PDRB dan sebaran sektor lapangan usaha juga tidak merata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan relative sulit upaya untuk pengentasan kemiskinan.

Pengaruh tidak langsung variable independen terhadap variable dependen melalui variable intervening menurut Suyana dapat diketahui dalam Ni Ketut Eni Endrayani (2016) melalui uji Sobel. Jika nilai $z_{hitung} < 1,96$, maka variabel independent berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap variable dependen melalui variable intervening dan jika nilai $z_{hitung} > 1,96$, maka variabel independent berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap variable dependen melalui variable intervening.

Berdasarkan uji Sobel diperoleh nilai Z_{hitung} dan dari nilai tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PAD: Nilai z_{hitung} sebesar $0,031580 < 1,96$ maka PAD berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. PMDN: Nilai z_{hitung} sebesar $0,007132 < 1,96$ maka PMDN berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Anggaran pendidikan: Nilai z_{hitung} sebesar $0,022755 < 1,96$ maka anggaran pendidikan berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

SIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan anggaran pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. PAD, PMDN dan PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. PAD, PMDN dan anggaran pendidikan berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui PDRB pada Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun saran-saran yang dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat perlu meningkatkan kualitas SDM tenaga pemungut pajak dan menambah sarana dan prasarana pengelolaan PAD sehingga penerimaan dan pengelolaan PAD menjadi lebih efektif. Dan mengalokasikan sebagian PAD untuk kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengajak investor dalam negeri untuk menanamkan investasi ke daerah dan menyiapkan akses transportasi ke daerah-daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat secara berkesinambungan mengalokasikan anggaran pendidikan dan penggunaannya untuk peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan murid.
4. PMDN diarahkan kepada daerah yang investasi fisik masih rendah, tidak terpusat pada daerah tertentu dan merata di semua sektor.

REFERENSI

- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *16*(03), 549–561.
- Eka, A., Eny, R., & Yana, U. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, *12*(2), 0216–7786. <http://journal.feb.unmul.ac.id/>
- Handayani, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2002 -2015. *Jurnal EKBIS*, *19*(1), 1024–1038.
- Harianja, Y., Sahara, & Muhammad Findi. (2020). Tingkat Kemiskinan di Pulau Papua Tahun 20011-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *7*(2), 189–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa, & Yasa, I. G. W. M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, *8*(5), 945–973.
- Nalyda Yola Althofia, N. A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja di propinsi jawa barat tahun 2012. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, *7*, 1–20.



- Ni Ketut Eni Endrayani, M. H. U. D. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *1*, 63–88.
- Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *2*(3), 119–128. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i3.2268>
- Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, *7*(3), 416–444.
- Rarung, P. (2016). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Pdrb Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(3), 449–460.
- Riduwan, E. A. K. (2021). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*.
- Riry Isramiwarti, M. Rasuli, T. T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 S.D 2015. *9*(3), 195–213.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, *14*(2), 113. <https://doi.org/10.24198/jmi.v14i2.19262>
- Supratiyoningsih, L., & Yuliarmi, N. N. (2022). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *11*(01), 1. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p01>
- Suryatno Wiganepdo S, H. S. (2022). Peran PMDN Dan PMA Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia. *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, *12*(1), 1–15. <https://doi.org/10.34010/jurisma.v12i1.5838>
- Trisnu, C. I. S. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2012). Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDRB di Provinsi Bali. *2013*, 88–95.
- Wardani, W. (2014). Analisis Pengaruh PMDN & PMA Terhadap PDRB di Kabupaten Siak. *Jom Fekon*, *1*(1), 1–18.
- Wiguna, V. I. (2013). Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Online Universitas Jambi*.

